



## Dua Tersangka Bansus Desa

**DALAM** kasus Dana Bantuan Khusus (Bansus) Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang tahun anggaran 2017 senilai Rp20 Miliar, Polda Kalbar sendiri sudah menetapkan dua tersangka. Keduanya berinisial BB dan RI. Sebanyak 176

• Baca Halaman 7

### Hal 1 | ■ dua tersangka

saksi pun telah diperiksa.

"Ditreskripsus juga sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini dan berpeluang jumlah tersangka akan bertambah," Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, Senin (25/11).

Akan tetapi, Kombes Pol Donny enggan membeberkan identitas dan jabatan kedua tersangka. Dia hanya menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Polda Kalbar belum memanggil mereka. Pernyataannya ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa Polda telah turun ke Bengkayang dan membawa para tersangka ke Pontianak.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, kami belum

melakukan pemanggilan lagi," katanya.

Sementara total kerugian dari Penghitungan Kekayaan Negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam perkara Bansus Desa Kabupaten Bengkayang mencapai Rp19 Miliar. Polda Kalbar disebutnya berhasil menyelamatkan aset dengan menyita Rp9 Miliar.

"Yang bikin lama (kasus ini) adalah proses penghitungan kerugian negara. Dimintakan suratnya Maret 2018, selesainya 8 November 2019, 18 bulan lebih," ungkapinya.

Anggota DPRD Bengkayang, Esidorus mengatakan sejatinya bantuan khusus desa secara kebijakan tak menyalaui aturan. Namun barangkali, dia menduga perkara ini

jadi kesalahan lantaran dalam pelaksanaannya memunculkan persoalan.

"Selanjutnya kita serahkan kepada proses hukum sesuai dengan ketentuan. Tentu kejadian ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semua," katanya.

Sementara Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Bengkayang, Rezza Herlambang menjelaskan beberapa kepala desa memang sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut. Akan tetapi, kapasitas mereka sebagai saksi.

"Semua tahapan (pemeriksaan) telah dilewati tanpa ada keluhan yang disampaikan kepada kami pengurus P-APDESI

Bengkayang," katanya.

Dari informasi yang diterimanya, mekanisme perhitungan kerugian negara dan pengembalian sisa anggaran juga telah dilaksanakan tanpa ada kendala.

"Para kades hanya menjawab apa yang mereka ketahui dan memang peran kades sangat pasif dalam hal ini, hanya penerima bantuan," katanya.

Dalam hal ini, P-APDESI Bengkayang berharap kasus ini bisa segera selesai dan proporsional.

"Para kades yang diperiksa sebagai saksi sudah kooperatif selama ini. Kami yakin aparat hukum akan bertugas secara profesional," sebutnya. (sms/nar/bls)